

DAFTAR PUSTAKA

A. Primer

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertanggal 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

B. Sekunder

Adhari, Agus, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019* (Dalam Bentuk Pdf).

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Budiarjo, M, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Cuenca, Ignacio Sanches, "Power, Rules and Compliance", dalam Jose Maria Maravall and Adam Przeworski, "*Democracy and the rule of law*" (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Diniyanto, Ayon, 2018 "*Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019*", Jurnal History, Volume 1, Nomor 1.
- Erfandi, S.H., M.H, *Parliamentary Threshold dan Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014).
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).
- Fraenkel, Ernst *The Dual State: A Contribution to the Theory of Dictatorship*, translates by E.A. Shils (New York: Oxford University Express, 1969).
- Fuqoha, 2017, "*Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*", Jurnal Ajudikasi, Volume 1, Nomor 2.
- Ghoffar, Abdul, 2018, "*Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*", Jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3.
- Hadjon Philipus. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1972).
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).
- Liddle, R. William, *Crafting Indonesia Democracy* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001).
- Nasir, Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi* (Malang: Averroes Press, 2005).

- Pahlevi, Indra, *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015).
- Powell, J.R.G. Bingham, *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions* (London: Yale University, 2000).
- Santoso, Topo dan Budhiati, Ida, *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Sargent, Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies* (Chicago: The Dorsey Press, 1984).
- Sibuea, Hotma. P, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, (Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007).
- Sidharta, B. Arief, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum "rule of law"* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2004).
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006).
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (PT Alumni: Bandung, 2006).
- Strong, C.F, *Modern Political Constituion* (London: ELBS & Jackson Ltd, 1961).
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ind Hill Co, 1989).
- Ubaedillah, A., dan Razak. Abdul, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003).
- Wibowo, Mardian, 2015, "Appraising the Constitutionally of Open Legal Policy in Judicial Review Activity", *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2.
- Wijisekera, Priyanee dan Reynolds, Diana, *Parliaments and Government In The Next Millenium* (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).

C. Tersier

<https://kbbi.web.id/ambang>. Diunduh pada tanggal 20 April 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>. Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2019.

<https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2019.

